

**KEPEMIMPINAN TRADISIONAL MASYARAKAT BATAK ANGKOLA
DI KERAJAAN LUAT MARANCAR PADA MASA
PENDUDUKAN BELANDA DAN JEPANG**

TESIS



Oleh

**SALMAN AL PARIS SORMIN
NIM 1104199**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam
mendapatkan gelar Magister Pendidikan

**PROGRAM PASCA SARJANA
KONSENTRASI PENDIDIKAN SEJARAH
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

Abstract

Salman Al Paris Sormin. 2013. *Traditional Leadership Angkola society in Luat Marancar Kingdom in Dutch and Japan period. Thesis, Graduate Program. State University of Padang.*

Problem on this research was function and king's role vanishing in society since paderi invention, Dutch and Japan colonization. It brought a changing to traditional government system that has been appropriate to custom and Batak Angkola's culture. This research was to know that traditional leadership of Angkola society in Luat Marancar Kingdom before Dutch was coming. Then, it was also to know impact of Dutch and Japan colonization to traditional leadership of Angkola society in Luat Marancar Kingdom. And, it was done in order to know the difference between traditional leadership in Dutch and Japan period in Angkola society in Luat Marancar Kingdom.

This research used history method by using primary and secondary sources. Primary sources in this research were kings' heritage notes who have become a leader in Luat Marancar kingdom, kings' generation who were still alive till now, and custom figure on that society who were pretended knowing the story of Marancar kingdom. For secondary sources, there were apparatuses regency government, old figures and documents or books that were related to this research. Besides, this research also used interview with some discipline approaches; anthropology, sociology as needed in order to enrich this research.

The findings of this research consisted of traditional leadership of Marancar Luat society before effect of Dutch was coming, leader or kings' role and function as leader and custom leader. However, after Dutch Government came to Luat Marancar, there was a significant changing of leadership concept in Luat Marancar which are kings' role and function changing into Dutch colonization servants in taking tax and controlling hard corvee. While when Japan came, there was no significant changing in government system in Luat Marancar Kingdom.

ABSTRAK

Salman Al Paris Sormin. 2013. *Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Batak Angkola di Kerajaan Luat Marancar Pada Masa Pendudukan Belanda dan Jepang*. Tesis. Program Pascasarjana (PPS) Universitas Negeri Padang.

Masalah dalam penelitian ini yakni hilangnya fungsi dan peranan raja dalam masyarakat pasca invasi paderi dan penjajahan Belanda dan Jepang. Sehingga banyak membawa perubahan dalam sistem pemerintahan tradisional yang telah ada sesuai dengan adat dan budaya Batak Angkola.

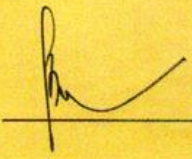
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kepemimpinan tradisional masyarakat Angkola di Kerajaan Luat Marancar sebelum masuknya Belanda. Kemudian untuk mengetahui dampak penjajahan Belanda dan Jepang terhadap kepemimpinan tradisional masyarakat Angkola di Kerajaan Luat Marancar, serta untuk mengetahui perbedaan model kepemimpinan tradisional masa Belanda dan Jepang pada masyarakat Angkola di Kerajaan Luat Marancar.

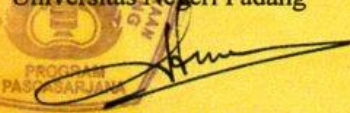
Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini yakni catatan-catatan peninggalan raja-raja yang pernah memimpin di kerajaan luat marancar, keturunan para raja yang masih hidup sampai sekarang, tokoh adat serta masyarakat setempat yang dianggap mengetahui riwayat kerajaan marancar, sedangkan sumber sekunder yakni aparat pemerintah daerah kecamatan marancar para tetua adat dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu juga menggunakan wawancara dengan menggunakan pendekatan disiplin ilmu lain, yakni antropologi, sosiologi sesuai dengan kebutuhan guna memperkaya hasil ini.

Dari hasil temuan peneliti, kepemimpinan tradisional pada masyarakat luat marancar sebelum masuknya pengaruh Belanda, seorang pemimpin atau raja memiliki peran dan fungsi sebagai pengayom masyarakat dan kepala adat. Namun setelah masuknya Gouvernement Belanda ke luat marancar terjadi perubahan yang signifikan dalam konsep kepemimpinan di luat marancar, yakni perubahan fungsi dan peran raja menjadi kaki tangan pemerintah kolonial Belanda dalam memungut pajak dan mengawasi kerja rodi. Sementara pasca masuknya Jepang, tidak ditemukan perubahan yang signifikan dalam sistem pemerintahan di Kerajaan Luat marancar.

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Mahasiswa : *Salman Alparis Sormin*
NIM. : 1104199

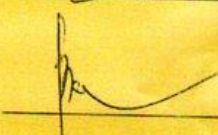
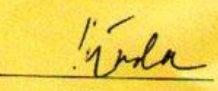
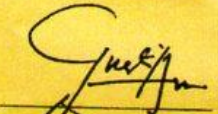
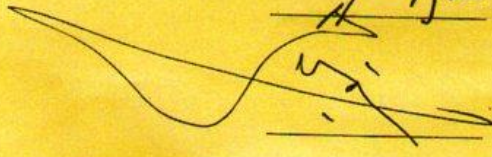
Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum.</u> Pembimbing I		<u>30¹²/2013</u>
<u>Dr. Buchari Nurdin, M.Si.</u> Pembimbing II		<u>7/11 2013</u>


Direktur Program Pascasarjana
Universitas Negeri Padang

Prof. Dr. Agus Irianto
NIP. 19540830 198003 1 001
PLT. SK Nomor: 187/UN35/KP/2013
Tanggal 23 Juli 2013

Ketua Program Studi/Konsentrasi


Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19610218 198403 2 001

**PERSETUJUAN KOMISI
UJIAN TESIS MAGISTER KEPENDIDIKAN**

No.	Nama	Tanda Tangan
1	<u>Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum.</u> (Ketua)	
2	<u>Dr. Buchari Nurdin, M.Si.</u> (Sekretaris)	
3	<u>Dr. Lindayanti, M.Hum.</u> (Anggota)	
4	<u>Prof. Dr. Gusti Asnan</u> (Anggota)	
5	<u>Dr. Jasrial, M.Pd.</u> (Anggota)	

Mahasiswa

Mahasiswa : **SALMAN ALPARIS SORMIN**
NIM. : 1104199
Tanggal Ujian : 13 - 8 - 2013

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, berupa tesis dengan judul **“Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Batak Angkola Di Kerajaan Luat Marancar Pada Masa Pendudukan Belanda Dan Jepang”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya ini asli gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan secara tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan bimbingan dan masukan dari tim pembimbing tesis.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa percabutan gelar sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, 2013

Saya yang menyatakan



SALMAN ALPARIS SORMIN
NIM. 1104199

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas berkat dan Rahmat-Nya penulisan Tesis berjudul “Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Batak Angkola di Kerajaan Luat Marancar” dapat terselesaikan dengan baik. Tesis ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mendapatkan gelar Magister Pendidikan Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial dengan konsentrasi Pendidikan Sejarah pada Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang (UNP).

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini banyak mendapat sumbangan dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Atas semua itu sudah sepantasnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Ibu Dr. H. Siti Fatimah M.Pd, M.Hum, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Buchari Nurdin, M.Si, selaku pembimbing II, dosen Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Bapak Prof. Dr. Gusti Asnan, Bapak Dr. Jasrial, M.Pd dan Ibu Dr. Lindayanti, M.Hum sebagai Dosen Penguji dan Dosen Program Pasca Sarjana yang telah banyak memberikan saran dan kritikan dalam perbaikan tesis ini.

Selanjutnya kepada Bapak Prof. Dr. Mukhaiyar M.Pd selaku Direktur Program Pasca Sarjana (PPS Universitas Negeri Padang (UNP), Bapak Prof. Dr. Gusril M.Pd selaku Asisten Direktur I dan Bapak Prof. Dr. Rusdinal selaku Asisten Direktur II serta segenap staf pegawai Program Pasca Sarjana (PPS) Universitas Negeri Padang (UNP) yang telah banyak memberikan kemudahan dan fasilitas selama mengikuti pendidikan. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama mengikuti pendidikan. Seluruh Informan yakni Raja Marancar Sutan Barumun II, Tokoh Masyarakat, yang telah membantu maupun masyarakat umum yang telah meluangkan waktunya kepada penulis. Ucapan sama juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa PPS UNP, rekan Program Studi IPS konsentrasi Pendidikan Sejarah Angkatan 2010/2011 yang telah memberikan motivasi dan bantuannya dalam penyelesaian studi ini. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih

tak terhingga untuk kedua orang tuaku tercinta, istri tercinta, abang, kakak dan adekku, terimakasih atas segalanya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak demi perbaikan tesis ini. Mudah-mudahan tesis ini ada manfaatnya di kemudian hari. Amin ya robbal Alamin.

Padang, Maret 2013

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	iii
PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Batasan Masalah.....	15
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Manfaat Penelitian.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Kajian Teori	18
1. Kepemimpinan	30
2. Syarat-Syarat Kepemimpinan	31
3. Tipe-Tipe Kepemimpinan	31
4. Tugas dan Fungsi Kepemimpinan.....	34
5. Sifat-Sifat Kepemimpinan.....	36
6. Raja Pada Masyarakat Batak Angkola	39
7. Fungsi Raja dalam Kehidupan Masyarakat Batak Angkola.....	42
8. Struktur Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Batak Angkola	44
B. Penelitian Relevan.....	46
C. Kerangka Konseptual	46

BAB IIIMETODE PENELITIAN	49
A. Lokasi dan Pendekatan penelitian	49
B. Metode Penelitian Sejarah.....	50
1. Heuristik	50
2. Verifikasi	52
3. Interpretasi.....	53
4. Historiografi	53
 BAB IVHASIL PENELITIAN	 56
A. Temuan Umum	56
1. Letak Geografis Kerajaan Marancar.	55
2. Sejarah Berdirinya Kerajaan Marancar	59
3. Sistem Kekerabatan Masyarakat Marancar	88
B. Temuan Khusus.....	91
1. Kepemimpinan Tradisional Masyarkat Batak Angkola Sebelumnya Masuknya Belanda	91
2. Kepemimpinan Tradisional di Kerajaan Luat Marancar Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda	99
3. Kepemimpinan Tradisional di Kerajaan Luat Marancar Pada Masa Penjajahan Jepang.....	119
4.Dampak Penjajahan Belanda dan Jepang Terhadap Sistem Pemerintahan Tradisional di Kerajaan Luat Marancar	128
C. Pembahasan Hasil Penelitian	132
1. Kepemimpinan Tradisional Masyarkat Batak Angkola Sebelumnya Masuknya Belanda	132
2. Kepemimpinan Tradisional di Kerajaan Luat Marancar Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda.....	146
3. Kepemimpinan Tradisional di Kerajaan Luat Marancar Pada Masa Penjajahan Jepang.....	157

4. Dampak Penjajahan Belanda dan Jepang Terhadap Sistem Pemerintahan Tradisional di Kerajaan Luat Marancar	159
BAB VSIMPULAN DAN SARAN	166
A. Simpulan.....	166
B. Implikasi.....	168
C. Saran.....	169
DAFTAR RUJUKAN.....	170
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Makam Raja Tinamboran	61
Gambar 2 : Silsilah Keturunan Baginda Mangalopi.....	63
Gambar 3 : Perkampungan Pertama Raja Tinamboran	64
Gambar 4 : Pemakaman Sutan Tinggi Barani	66
Gambar 5 : Hubungan <i>Dalihan Na Tolu</i> dari hasil perkawinan	90
Gambar 6 : Hubungan Kekerabatan <i>Dalihan Na Tolu</i> yang terdiri dari beberapa Marga	91
Gambar 7: Bagan Kepemimpinan Tradisional Kerajaan Marancar	94
Gambar 8 : Bagan Struktur Masa Kolonial Belanda di Tapanuli.....	102
Gambar 9 : Bagan Perubahan Struktur Kepemimpinan Tradisional Masa Belanda	104
Gambar 10 : SriPaduka Sutan Barumun I Beserta Hulubalang.....	115
Gambar 11 : Sutan Barumun II Baginda Soaduan alias Patuan Kumala Pontas Soaduan	117
Gambar 12 : Bagan Struktur Pemerintahan Masa Kolonial Belanda di Tapanuli	122
Gambar 13: Bagan Struktur Pemerintahan dari Masa Kolonial Belanda ke Masa Jepang di Kerajaan Luat Marancar.....	126
Gambar 14 : Struktur Masyarakat Zaman Kerajaan.....	145
Gambar 15 : Struktur Hierarki Pada Masa Kolonial	155
Gambar 16 : Struktur Masyarakat Pada Masa Kolonial	156

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian tentang pola dan sistem kepemimpinan tradisional merupakan suatu hal yang menarik, karena konsep kepemimpinan seringkali sangat erat hubungannya dengan kondisi politik, perubahan sosial dan pergeseran dinamika lain di tengah-tengah masyarakat. Disisi lain pola kepemimpinan yang berlangsung di tengah masyarakat tertentu tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung masyarakat itu sendiri, seperti sosial budaya, sistem nilai, agama dan kepercayaan yang dianut, peranan dan status yang di embannya.

Manusia diturunkan ke bumi untuk menjadi pemimpin, baik bagi sebuah bangsa, umat, keluarga, masyarakat maupun kelompok, minimal pemimpin bagi diri sendiri. Karakter seorang pemimpin ialah seorang figur yang dapat menjadi suri tauladan, setiap gerak langkah dan tutur katanya merupakan tamsil bagi bawahannya.

Namun dalam proses dinamika masyarakat sering kali diwarnai oleh perilaku dari sejumlah tokoh masyarakat yang seringkali tidak dikehendaki oleh masyarakat. Oleh karena itu orang-orang yang menjadi anggota dalam suatu masyarakat selalu menginginkan para pemimpin mereka menjadi suri tauladan yang baik dan berbuat adil.

Namun apa yang diharapkan masyarakat tidak selamanya berjalan seperti apa yang diharapkan. Aturan-aturan hukum formal acapkali tidak menjadi alat kontrol masyarakat untuk mengendalikan tindakan-tindakan yang kurang baik yang dilakukan oleh para tokoh dan pemimpin masyarakat. Masyarakat sebagai komponen utama suatu wilayah, mempunyai hak untuk menilai terhadap keberadaan para pemimpinnya. Penilaian tersebut dapat terwujud dalam berbagai bentuk baik kegembiraan ataupun kekecewaan, respon masyarakat itu bergantung pada perspektif masyarakat atau perilaku dari para pemimpinnya.

Provinsi Sumatera Utara merupakan Provinsi yang memiliki beraneka ragam suku bangsa (etnis), dan keseluruhan etnis tersebut memiliki latar belakang sejarah yang menarik untuk dikaji, tanpa terkecuali keberadaan suku di Kabupaten Tapanuli Selatan. Salah satu suku yang terdapat di Sumatera Utara adalah suku Batak Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan, disamping itu ada juga suku Batak lainnya seperti : 1) suku Batak Mandailing, 2) Batak Toba, 3) Batak Simalungun, 4) Batak Pak-Pak Dairi, 5) Batak Karo (Simanjuntak, 2002:1).

Dari keenam sub-suku Batak tersebut, suku Batak Toba merupakan leluhur suku Batak lainnya seperti Batak Mandailing, Batak angkola, Batak Simalungun, Batak Pak-Pak Dairi dan Batak Karo

(Parlindungan, 1962 : 23). Pada masa itu sering terjadi pertengkaran antar keluarga (marga), sehingga marga di daerah pinggiran Danau Toba yang tidak mampu mempertahankan wilayahnya dari serangan marga-marga yang lain akan bermigrasi mencari daerah baru yang dianggap aman tanpa terkecuali daerah bagian selatan.

Secara ekonomis kondisi alam daerah yang mereka diami dirasakan kurang memberikan keuntungan dalam menunjang kehidupan, maka mereka berpindah ke daerah-daerah lain termasuk daerah bagian selatan, sedangkan dilihat dari faktor petualangan, beberapa etnis tersebut mencari daerah-daerah baru. Dan salah satu kegemaran sebagian orang Batak pada waktu itu adalah merantau sehingga mendorong mereka untuk keluar ke daerah lain.

Beberapa waktu kemudian banyak diantara pendatang yang menetap di daerah selatan dan terpecah menjadi beberapa keluarga (marga). Keluarga pada etnis Batak lazim dikenal dengan istilah marga. Istilah marga digunakan untuk memperkuat rasa persaudaraan di antara mereka, dan memang menurut silsilah mereka ini adalah satu keturunan/kekerabatan yang dekat untuk mempersatukan anggota keluarga, mereka memakai marga sesuai dengan nenek moyang.

Suku Batak Toba mendiami daerah pinggiran Danau Toba, Suku Batak Angkola di bagian selatan Danau Toba dan paling selatan lagi adalah Suku Batak Mandailing, Suku Batak Simalungun mendiami

daerah bagian Timur, Suku Batak Pak-Pak Dairi daerah bagian Barat, Suku Batak Karo di daerah bagian Utara Danau Toba, Suku Melayu di pesisir pantai timur.

Khususnya Tapanuli Bagian Selatan jauh sebelum masuknya pengaruh asing, sudah terdapat banyak komunitas kecil yang disebut sebagai huta. Setiap huta (*village*) dipimpin oleh seorang raja dengan gelar *Raja Pamusuk*. Setiap huta ini mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang secara tradisional berdiri secara otonom. Sejumlah huta yang berdekatan secara teritorial dan terkait hubungan darah (*genealogis*) membentuk sebuah kawasan adat yang disebut *Luh* yang dipimpin oleh *Raja Panusunan Bulung*.

Dalam menjalankan pemerintahan *huta* dan *Luh* para *Raja Pamusuk* dan *Raja Panusunan Bulung* mengacu pada sistem adat Batak yang mengatur sedemikian rupa dengan berlandaskan prinsip kekerabatan "*dalihan na tolu*". *Raja Panusunan Bulung* dipilih dari antara *Raja Pamusuk* yang terdapat dalam *Luh*, khususnya dari pihak turunan "*sipungka huta*" (yang membuka huta) di dalam *Luh* yang bersangkutan. *Raja Panusunan Bulung* ini selain sebagai kepala pemerintahan, juga sekaligus menjadi pengetua adat atau Raja Adat yang memimpin berbagai kegiatan seperti keagamaan, social hingga kegiatan ekonomi di seputar kawasan *Luh* yang menjadi wilayah kekuasaannya.

Sekalipun sistem pemerintahan Luhat yang terbentuk mirip sistem oligarki (dari turunan *si pungka huta*), namun sesungguhnya sistem demokrasi yang lebih berperan yang direpresentasikan dengan adanya *Lembaga Hatobangon* (Lembaga Tetua Adat) yang fungsinya mendampingi *Raja Panusunan Bulung* dalam memimpin *Luhat*. Ini berarti setiap warga dari komunitas atau *huta* terwakili di dalam musyawarah *Luhat*. Mendahulukan *sipungka huta* yang juga menjadi *Raja Panusunan Bulung* sudah sepantasnya untuk didudukkan sebagai pemimpin *Luhat*, namun keputusannya terkendali oleh peran *lembaga hatobangon*.

Suatu komunitas kecil dikatakan sebagai *huta* jika komunitas tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan sendiri hingga dapat berdiri sendiri, dan *huta* ini diresmikan menjadi *Bona Bulu*. Komunitas kecil ini berawal dari tradisi membuka *huta* di dalam kawasan *Luhat* yang dalam perjalanannya komunitas kecil tersebut lalu berkembang menjadi *Bona Bulu*. Sebuah *huta* yang dapat diresmikan menjadi *Bona Bulu*, manakala telah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: (1) terdapat penduduk sekurang-kurangnya tiga keluarga 'dalihan na tolu' yang terdiri dari kahanggi (bersaudara), anak boru (besan dari pihak perempuan), dan mora (besan dari pihak laki-laki); (2) tersedia lahan yang cukup untuk pertanian (tanaman pangan, peternakan atau perikanan); (3) ada pemerintahan yang mampu menyelenggarakan

tertib umum dan dapat meningkatkan kemajuan serta kesejahteraan hidup terhadap semua keluarga di dalam komunitasnya; (4) mendapat pengakuan atas keberadaan calon huta oleh seluruh huta yang sudah ada disekitarnya di dalam Luhat.

Konsep kepemimpinan raja merupakan bagian adat budaya "*Dalihan Na Tolu*" bagi laki-laki di Tapanuli Selatan yang masih dapat kita jumpai hingga hari ini. Raja merupakan sebutan untuk sebutan untuk menyatakan keberadaan pimpinan suatu masyarakat pada wilayah *huta*, sedang sebutan "*Raja*" adalah gelar yang diberikan oleh masyarakatnya kepada seorang laki-laki yang telah menikah di daerah ini, oleh karenanya kuat dugaan penulis bahwa telah terjadi akulturasi budaya Batak dan Minangkabau di Tapanuli Selatan.

Keberadaan Raja-raja adat dalam budaya *Dalihan Na-Tolu* di Tapanuli Selatan merupakan sosok pemimpin adat yang melakoni setiap upacara-upacara adat seputar kehidupan (*life cycle ceremonies*) di tengah-tengah masyarakatnya, yang terdiri dari upacara *Siluluton* dan upacara *Siriaon*. *Siluluton* artinya peristiwa yang dialami seseorang dalam bentuk kesedihan (duka cita) seperti kematian, dan hal-hal yang bersifat musibah. Sedangkan *Siriaon* artinya peristiwa yang dialami seseorang atau keluarga dalam bentuk kegembiraan (suka cita) seperti perkawinan, kelahiran, memasuki rumah baru dan lain sebagainya. Bentuk peristiwa ini dalam kehidupan orang Tapanuli Selatan

melibatkan anggota kerabat dengan upacara adat dan agama.

Disamping fungsi Raja untuk memimpin upacara-upacara di seputar lingkaran kehidupan masyarakat di bawah teritorial kekuasaannya, Raja juga menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan yang terjadi. Hal ini diselesaikan dalam rapat adat, dimana rapat adat dilaksanakan untuk mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat sekaligus pengadilan adat. Pemerintahan tradisional di Tapanuli Selatan berbentuk kerajaan yang bersifat Oligarki.

Raja sebagai pemimpin eksekutif dibantu oleh anak boru dan didampingi oleh mora sebagai penasehat. *Dalihan Na-Tolu* sebagai badan legislatif terdiri dari *kahanggi*, *anak boru* dan *mora* bersama dengan *hatobangon*, yaitu para sesepuh dan cerdik cendikia yang arif dan bijaksana. Mereka ini terdiri dari wakil marga-marga yang berdiam di huta yang bersangkutan disebut dengan pimpinan Ripe-Ripe. Selain mewakili Ripe para pemuka agama tergolong dalam *hatobangon*. Pada abad yang lalu masyarakat Angkola dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu: *namora-mora* (golongan bangsawan), *halak najaji* (orang banyak), *hatoban* (golongan budak). Namun sejak masuknya Belanda ke tanah Angkola pada tahun 1876 secara resmi menghapuskan sistem perbudakan di Tapanuli Selatan

Islam masuk ke wilayah Angkola sejak tahun 1816. Pada waktu

itu terjadilah pengislaman pada masyarakat Angkola, yang sebelumnya menganut kepercayaan Animisme (Sipelebegu). Karena berada di bawah pengaruh Animisme, tentu saja adat istiadat orang angkola sebelum ditaklukkan oleh kaum Paderi banyak berkaitan dengan kepercayaan itu.

Keadaan adat istiadat yang demikian, tentu saja sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam yang dibawa oleh kaum Paderi dari Sumatera Barat. Oleh karena itu dalam mengembangkan ajaran agama Islam, kaum Paderi telah menghapuskan berbagai kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan agama Islam. Dengan demikian, maka terjadilah berbagai perubahan besar dalam adat istiadat masyarakat Angkola di bawah ajaran agama Islam yang dikembangkan oleh kaum Paderi.

Namun demikian, Pemerintah Paderi masih memberikan toleransi pada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat sejauh tidak merubah aqidah agama islam. Sejak berkuasanya kaum Paderi di wilayah angkola, atau pemerintahan tradisional yang ada setelah kaum Paderi menguasai daerah ini, dan agama Islam yang telah dianut oleh masyarakat, telah merubah struktur dan sistem pemerintahan yang ada.

Kalau waktu sebelumnya raja "Panusunan Bulung" yang membawahi beberapa "huta", hanya mempunyai peranan tertentu

saja, yaitu dalam masalah adat istiadat (Suheri Harahap, 2005:6). Sedangkan raja “Pamusuk” mempunyai peranan yang lebih dominan dalam setiap “huta” yang dikuasainya. Akan tetapi setelah wilayah ini dikuasai oleh kaum Paderi, atau agama Islam lebih eksis dari pada adat istiadat, maka sistem dan struktur pemerintahan itu mengalami perubahan. Raja “Panusunan Bulung” yang secara formalitas menguasai wilayah yang terdiri dari beberapa “huta”, atau wilayah kenegarian, dirubah sebutannya menjadi kepala “Kuria”. Istilah “Kuria” ini berasal dari bahasa Arab “Qoriah”. Yang artinya adalah wilayah (Suheri Harahap, 2005:5).

Lebih lanjut Suheri (2005:6) penguasanya di sebut sebagai “khadi”, yang dapat juga berarti “hakim”. Dengan demikian seorang raja “Panusunan Bulung” yang mengepalai sebuah “Kuria”. Ketika nama itu sudah berubah menjadi “Khadi”, dan kekuasaannya juga bertambah luas para “Khadi setiap “Kuria”, bukan saja berkuasa dibidang keagamaan, melainkan juga dibidang politik, ekonomi, dan sosial. Jelasnya kalau sebelumnya tokoh-tokoh tradisional pada masa paderi memerintah berdasar pada syariat (norma-norma menurut ajaran agama Islam).

Hal ini terus berlanjut sampai kolonial Belanda menguasai Tanah Angkola. Kekuasaan Belanda dan Jepang hingga masa kemerdekaan RI. Keberadaan *huta* yang dulu Raja-nya memiliki

kekuasaan penuh lambat laun kekuasaan tersebut tidak memiliki apa-apa kecuali sebagai Raja adat pada masyarakatnya.

Razzaq (2001:121) masa pendudukan Belanda di Tapanuli para Raja, merupakan perpanjangan tangan Belanda, dengan tujuan utama untuk mengutip pajak dari rakyat dan menyerahkan masyarakat untuk melakukan kerja paksa (rodi) yang sangat menderitakan masyarakat Angkola.

Berbeda dengan pendudukan Belanda, masa pendudukan Jepang tidak ada kelas sosial seperti yang diciptakan oleh Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, semua golongan diajak untuk ikut dalam membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya, sebagaimana yang di kemukakan Reid (2010:78) inovasi yang sungguh luar biasa dari pemerintahan Jepang adalah diajaknya semua sumber kepemimpinan yang ada untuk masuk ke dalam berbagai administratif, penasehat, propaganda tempat sedikit banyaknya mereka bekerja sama dengan Jepang.

Hingga saat ini fenomena raja sebagai pemimpin dalam masyarakat di daerah Angkola masih mengundang kontradiksi. Sebab adat budaya masyarakat Angkola menjunjung tinggi kepemimpinan raja, namun disisi lain akibat penetrasi Belanda dan Jepang terjadi kesenjangan antara kaum bangsawan (raja) dengan rakyat, akibatnya timbul kebencian terhadap para raja dan beralih kepada kepemimpinan

yang ditawarkan Islam sebagai agama baru yang masuk ke wilayah angkola.

Penelitian tentang sejarah kepemimpinan raja di Angkola hingga saat ini, sangat sedikit sekali dilakukan bahkan hampir tidak ada, pada hal basic struktur masyarakat angkola adalah *dalihan natolu* yang tidak terlepas dari raja. Namun karena kebencian terhadap raja akibat pengaruh islam, belanda dan jepang, banyak nilai-nilai adat yang telah hilang saat ini.

Untuk itu, perlu dilakukan penelitian tentang masalah perubahan kepemimpinan raja di Tapanuli selatan, melalui kajian historis. Adapun yang menjadi fokus penelitian penulis pada kesempatan ini adalah Kerajaan Luat Marancar. Kerajaan Marancar terletak di antara lembah gunung Lubuk Raya dan Gunung Sibualbuali, secara geografis letak kerajaan ini berada di sebelah barat Kota Padangsidempuan, dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Utara disebelah barat. Kerajaan Marancar adalah sebuah kerajaan yang saat ini masih menjalankan sistem budaya angkola secara turun-temurun. Pada masa pemerintahan Belanda, kerajaan ini merupakan pasak bagi pemerintahan belanda yang berpusat di Padangsidempuan.

Daerah kerajaan ini, boleh dikatakan daerah yang subur dan kaya akan mineral tambang, oleh sebab itu tidak asing lagi saat ini di

daerah ulayat kerajaan ini terdapat tambang Emas terbesar kedua setelah *freefort* di papua untuk wilayah Indonesia bahkan asia. Selain pertambangan emas yang dikelola pihak asing di wilayah kerajaan ini, saat ini juga sedang dilakukan perintisan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas ribuan megawatt, tepatnya di sungai Batangtoru yang berada disebelah barat kerajaan ini. Oleh sebab itu peneliti berasumsi bahwa Harta Karun Tapanuli, yang sering diungkapkan oleh para leluhur bangsa angkola terletak di wilayah kerajaan ini.

Sementara itu, bila dilihat dari struktur sosial masyarakat Marancar saat ini masih menjunjung tinggi budaya adat *dalihan na tolu*, sekalipun sturktur itu hanya berlaku dalam upacara adat semata. Budaya *dalihan na tolu*, secara umum memang dianut oleh masing-masing suku batak yang ada di Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi tidak pula bisa dikatakan sama. Masing-masing sub-suku batak memiliki ciri tersendiri.

Begitupula dengan sebutan Angkola, banyak orang baik itu akademisi, pemerintahan maupun masyarkat awam yang menyebutkan orang-orang Angkola itu adalah suku Mandailing, padahal Mandailing dan Angkola sangat jauh berbeda sekalipun terdapat beberapa kesamaan dalam budayanya. Sehingga saat ini bisa dikatakan suku bangsa Angkola saat ini kehilangan idenditasnya.

Orang-orang yang berasal dari wilayah lembah bukit barisan, lubuk raya, dolok sibual-buali acap kali menyebut diri mereka mandailing, padahal secara historis mereka adalah etnis Angkola yang memiliki idenditas tersendiri.

Menurut hemat penulis kenyataan ini, disebabkan pembatasan yang tegas tentang sebutan islam-kristen bagi orang-orang yang berada di wilayah selatan sumatera utara, orang-orang yang tinggal di bagian utara tepatnya Batak Toba, secara umum menganut agama Kristen dan orang-orang yang berada paling selatan secara umum menganut agama Islam, tepatnya Mandailing, sehingga masyarakat Angkola yang tepatnya berada diantara kedua daerah ini, seolah-olah bingung untuk berkata secara tegas mengatakan idenditas mereka, karena mereka juga menganut islam, sebaran dari Islam Padri, memilih untuk menyebut diri mereka Mandailing agar terhindar dari sebutan Batak Kristen.

Perbedaan itu sebetulnya sangat mudah ditemukan sampai saat ini, dilihat dari bahasa yang digunakan orang-orang Angkola cenderung lebih keras namun dengan nada yang lebih rendah ketimbang orang Batak Toba dan lebih tegas di banding Batak Mandailing. Sedangkan dari kesatuan marga, orang-orang Angkola secara umum bermarga Siregar, Harahap, Dalimunthe, Hutasuhut sedangkan Mandailing, Lubis, Nasution, Parinduri, Daulay.

Struktur pemerintahan tradisional sampai saat ini masih mudah dijumpai, yakni masyarakat Angkola yang tinggal di daerah pegunungan cenderung dikuasai oleh masyarakat yang bermarga Siregar, sedangkan daerah lembah umumnya dikuasai masyarakat yang bermarga Harahap dan Dalimunthe. Hal ini menurut hemat penulis sudah cukup kuat menunjukkan Angkola adalah sub-suku Batak yang berdiri sendiri dan memiliki identitas tersendiri dan bukan Mandailing.

Sementara itu sebutan untuk Angkola sendiri, sebutan yang diberikan oleh Raja Rajendra Cola dari India Selatan, ketika menyerang Sriwijaya melalui Padang Lawas. Nama Angkola berasal dari nama sungai di Angkola yaitu (sungai) batang Angkola. ([http://Wendy Hutahean. Batak Angkola di Tapanuli Selatan. Blogspot.com](http://WendyHutahean.BatakAngkola.diTapanuliSelatan.Blogspot.com)).

Dari kenyataan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji secara historis fluktuasi dari kerajaan ini mulai dari masa yang paling awal hingga masa pendudukan Jepang dengan judul: Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Batak Angkola di Kerajaan Marancar.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian permasalahan tersebut di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah kepemimpinan tradisional masyarakat Angkola di Kerajaan Luat Marancar sebelum masuknya Belanda?
2. Bagaimanakah Sistem Kepemimpinan Tradisional di Kerajaan Luat Marancar Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda?
3. Bagaimanakah Sistem Kepemimpinan Tradisional di Kerajaan Luat Marancar Pada Masa Penjajahan Jepang
4. Bagaimanakah dampak penjajahan Belanda dan Jepang terhadap kepemimpinan tradisional masyarakat Angkola di Kerajaan Luat Marancar?

C. Batasan Masalah

Mengingat masalah yang teridentifikasi relatif banyak dan karena keterbatasan peneliti, maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Batasan Masalah

Alasan peneliti mengambil judul “Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Batak Angkola di Kerajaan Marancar adalah untuk mengamati dan mengetahui lebih jauh tentang sejarah kepemimpinan tradisional di Kerajaan Marancar baik dalam lintas sejarah maupun kekinian, sekaligus mengamati proses pergeseran status bangsawan di Tapanuli Selatan.

2. Batasan Spasial

Penulis sengaja mengambil lokasi di Kerajaan Marancar karena secara faktual di sana masih banyak terdapat golongan bangsawan sekaligus secara emosional dan kedekatan secara geografis mudah dijangkau oleh peneliti.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan kepemimpinan tradisional masyarakat Angkola sebelum masuknya Belanda.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan Sistem Kepemimpinan Tradisional di Kerajaan Luat Marancar Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda.
3. Untuk mengetahui dan menggambarkan Sistem Kepemimpinan Tradisional di Kerajaan Luat Marancar Masa Penjajahan Jepang.
4. Untuk mengetahui dan menggambarkan dampak penjajahan Belanda dan Jepang terhadap kepemimpinan tradisional masyarakat Angkola.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat ini diharapkan memberikan manfaat seputar pengkajian tentang sejah

kepemimpinan tradisonal, khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sekaligus dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan dorongan bagi peneliti lain untuk dimanfaatkan sebagai bahan acuan ataupun perbandingan dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam dan lebih lengkap.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi masyarakat umum hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan wawasan tentang dinamika kepemimpinan raja adat.
- b) Bagi golongan bangsawan pada khususnya hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan wawasan dalam kiprahnya selaku anggota masyarakat.
- c) Bagi institusi dan pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan sekaligus refrensi untuk mencermati beberapa pola stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat dibuat suatu kesimpulan tentang sejarah kepemimpinan Tradisional di Kerajaan Luat Marancar yaitu:

1. Sistem pemerintahan tradisional di Marancar, merupakan sistem pemerintahan yang demokratis atau berdasarkan pada musyawarah mufakat. Raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada masyarakat Tapanuli Selatan, dalam menjalankan fungsinya tetap bersama-sama dengan raja “Huta” lainnya.
2. Pada tahun 1834, Belanda mendirikan Keresidenan Tapanuli. Pusat keresidenan berada di Sibolga dan menguasai empat daerah afdeling, yaitu, Sibolga en Omstreken, Angkola en Sipirok, Bataklanden, dan Nias. Pada tanggal 1 Maret 1887, Belanda membentuk keresidenan di daerah Sumatera Timur. Keresidenan Sumatera Timur berpusat di Medan, terdiri atas empat daerah afdeling, yaitu, Deli Serdang, Simalungun dan Karolanden, Langkat, dan Asahan. Penguasaan Belanda atas Tapanuli membawa perubahan besar bagi kerajaan Luat Marancar, fungsi

raja yang sebelumnya mengayomi rakyatnya berubah menjadi kaki tangan Belanda dalam menjalankan pemerintahannya.

3. Sedangkan setelah masuknya Jepang di Tapanuli, Istilah Resident peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda oleh Jepang diganti menjadi Cokan; Asistent Resident yang memimpin Afdeeling diganti menjadi Gunseibu; Controleur yang mengepalai Onder Afdeeling dihilangkan tetapi posisi Demang yang sebelumnya memimpin District ditingkatkan untuk memimpin onder Afdeeling yang disebut Gunco; Asisten Demang yang mengepalai Onder district diganti menjadi Huku Gunco; Kepala Kampung diganti menjadi Kuco, sedangkan Kepala Polisi disebut Keibi.
4. Sementara itu dampak dari sistem pemerintahan buatan Belanda dan Jepang bagi masyarakat yang ada di Kerajaan Luat Marancar yakni timbulnya kebencian rakyat terhadap pada Raja yang sebelumnya sangat harmonis dan menjunjung tinggi adat *Dalihan Natolu*. Nilai-nilai budaya *Dalihan Natolu*, sebagai asas pemerintahan raja dalam menjalankan roda pemerintahan tidak lagi dipakai sehingga kepercayaan rakyat terhadap para Raja sudah sirna. Selanjutnya dampak yang ditimbulkan perubahan tersebut adalah masyarakat di Kerajaan Luat Marancar lebih memilih sistem pemerintahan yang berdasarkan aqidah Islam, sebab raja dan

konsep *Dalihan Natolunya* dianggap sebagai kaki tangan para penguasa (Belanda dan Jepang).

B. IMPLIKASI

Dalam setiap lembaga termasuk dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selalu dibutuhkan kehadiran seorang pemimpin. Peran (*role*) seorang pemimpin sangat sentral dan strategis karena ia dibutuhkan sebagai *motivator*, *mediator*, dan *komunikator* dalam pembangunan. Seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya harus mendapatkan legitimasi dari masyarakatnya. Sikap pemimpin yang sesuai dengan model kepemimpinan dan sifat-sifat ideal dianggap mulia akan menjadikan seorang pemimpin sebagai idola bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Pembicaraan tentang kepemimpinan dan pemimpin yang ideal menjadi penting ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa pemilihan pemimpin hampir di semua level pada saat ini telah tercoreng oleh praktik politik uang dan janji-janji yang muluk tetapi tidak ditepati. Kondisi itu pada gilirannya mendorong terjadinya degradasi dan pergeseran nilai budaya dalam masyarakat, terutama menyangkut kepemimpinan. Para pemimpin sudah seharusnya berusaha menjalin hubungan yang membuatnya dekat dengan rakyat. Tanpa rakyat, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah bentuk kerinduan rakyat terhadap para pemimpinnya.

C. SARAN-SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan penelitian, maka dapat disarankan, yakni :

1. Pengkajian terhadap sejarah kepemimpinan tradisional lebih di tingkatkan lagi untuk melihat lebih jelas fenomena kepemimpinan raja pada masa lalu.
2. Perlunya penataan kembali lembaga-lembaga adat agar dapat menghidupkan kembali adat istiadat yang dimodifikasi berdasarkan agama.
3. Adat tradisi dapat dikembangkan, namun rela meninggalkan hal-hal yang menghambat kemajuan.

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Abdullah, Taufik. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Azhari, Ichwan. *Konstruksi Batak dan Tapanuli Dalam Ruang Administratif di Sumatera Utara Sejak Abad Ke 19*, Medan: Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sejarah Universitas Negeri Medan, 2011.
- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Amini, Ibrahim, *Para Pemimpin Teladan*. Jakarta: Al-Huda, 2006.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992.
- Dada Meuraxa, *Sejarah Kebudayaan Suku-suku Bangsa di Sumatera Utara*. Medan: Sasterawan, 1973.
- Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos, 1999.
- Dwiyanto, Agus, dkk, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, UI-Press: Jakarta, 1984.
- Harahap, Mohammad Yusuf, *Sumatera Utara Dalam Lintasan Sejarah*. Medan, 1984.
- Hutagalung, W, *Sejarah Batak*. Medan: Fa. Sihardo, 1971.
- Ihromi T.O. *Antropologi dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.